

Laporan Pemantauan Konflik di Aceh

1 – 30 September 2007

Bank Dunia/DSF



Di bulan September, jumlah total konflik masih tetap sama dengan bulan lalu dan relatif rendah.¹ Jumlah insiden kekerasan hanya 14 kasus. Ini merupakan penurunan signifikan dibanding dengan tingkatan tinggi yang tercatat sejak Maret tahun ini. Namun, hal ini tampaknya lebih disebabkan pengaruh datangnya bulan suci Ramadhan. Di bulan ini, juga terdapat beberapa konflik yang terkait dengan pergantian posisi kunci dalam pemerintahan, sebagai salah satu praktik balas jasa yang dilakukan oleh kepala pemerintahan baru untuk mengkonsolidasi kekuatan dan melunasi hutang-hutang politiknya kepada para pendukungnya. Hanya satu dari konflik-konflik tersebut yang berakhir dengan insiden kekerasan, yaitu serangan terhadap konvoi Teungku Busmadar, Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, yang terjadi pada 27 September. Konflik-konflik ini menggambarkan tingginya tekanan terhadap pemerintah lokal oleh GAM/KPA dan kelompok-kelompok lainnya, dan menunjukkan semakin menajamnya perpecahan dalam tubuh GAM/KPA. Kelompok yang awalnya bersatu pada masa konflik karena persamaan ideologi, kini makin terpecah ke dalam sejumlah faksi dan aliansi baru yang lebih berdasarkan faktor kepentingan pribadi. Peralihan faktor penyebab konflik kontemporer ini juga digambarkan oleh meningkatnya aksi kriminalitas bersenjata. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengeluarkan maklumat, dimana masyarakat yang masih menyimpan senjata ilegal diberi waktu satu bulan untuk menyerahkannya, dengan jaminan tidak akan dijatuhkan sanksi hukum. Setelah masa satu bulan tersebut berakhir, aparat polisi dan militer akan melakukan operasi sweeping secara intensif. Keputusan ini memberi tekanan berat terhadap KPA, yang secara implisit dianggap bertanggung jawab untuk menegakkan disiplin dalam jajaran organisasinya. Laporan pemantauan ini juga mendiskusikan konflik terkait bantuan. Data yang dikumpulkan selama enam bulan terakhir menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan harus segera memperbaiki penanganan bantuan untuk mengembalikan kepercayaan publik. Di samping itu, sebuah komentar oleh Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Bapel BRR, bahwa syariah Islam menghambat proses pembangunan, menuai protes publik. Ini menunjukkan bahwa syariah Islam tetap sebuah isu yang sangat sensitif.

¹ Sebagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Program Konflik dan Pengembangan di Bank Dunia Jakarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan di dua surat kabar daerah (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, sejauh mungkin didukung oleh kunjungan lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Laporan Pemantauan bulanan dapat diakses melalui: www.conflictanddevelopment.org. dataset tersedia bagi mereka yang membutuhkan, dengan menghubungi Blair Palmer di bpalmer@worldbank.org atau Adrian Morel di amorel1@worldbank.org. Terdapat keterbatasan dalam menggunakan surat kabar untuk memetakan konflik, lihat Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005) "Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia", *Indonesian Social Development Paper* No. 7. Jakarta: World Bank.

Konflik politik berlanjut, akibat sejumlah faksi berebut mendapatkan keuntungan setelah pilkada.

Pada tanggal 27 September, ketika rombongan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, Teungku Basmadar, kembali dari Safari Ramadhan di kecamatan Pandrah, diserang oleh pelaku tak dikenal (lihat Kotak 1). Tgk Busmadar sebelumnya telah menjadi sasaran sebuah insiden serius ketika sebuah granat meledak di kantornya pada tanggal 29 Juli (lihat Laporan Pemantauan bulan Juni-Juli). Serangan-serangan ini tampaknya terkait dengan tekanan dari faksi lokal GAM/KPA terkait pergantian Sekretaris Daerah (Sekda). Sekda adalah posisi penting di pemerintahan kabupaten, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan teknis proyek pemerintah, termasuk proses tender. Sebuah faksi GAM/KPA mengajukan kandidatnya sendiri untuk posisi tersebut, yaitu Azhari Usman, dengan harapan mendapatkan pengaruh politik dan kontrak proyek yang menguntungkan. Meski demikian, Bupati Nurdin dan Busmadar lebih memilih Dr. Nasrullah Muhammad, mantan Sekda Aceh Utara yang tidak memiliki afiliasi dengan GAM.²

Kotak 1: Penyerangan terhadap konvoi Tgk Busmadar, Wakil Bupati Kabupaten Bireuen

27 September, 23:30 WIB, Desa Gampong Blang, Kecamatan Pandrah, Bireuen. Dalam perjalanan pulang dari masjid Gampong Blang ke Bireuen, bis yang membawa Teungku Busmadar dan 24 pejabat lainnya menjadi sasaran dua kali serangan pelemparan batu oleh pelaku tak dikenal. Empat orang mengalami luka-luka akibat pecahan kaca. Menurut beberapa saksi, mereka melihat dua orang laki-laki membawa pelontar batu di sekitar desa sebelum insiden tersebut. Hal ini menunjukkan unsur kesengajaan dalam insiden tersebut. Kapolres Bireuen mengatakan bahwa pelaku telah teridentifikasi, namun sampai akhir September belum ada pelaku yang ditangkap.

Di Aceh Timur, pergantian posisi pemerintahan juga merupakan isu yang menonjol dalam perselisihan yang sedang terjadi antara Bupati Muslim Hasballah, yang berafiliasi dengan GAM, dengan Wakil Bupati, Nasruddin Abubakar. Meski bukan mantan GAM, Nasruddin dulunya adalah seorang aktivis SIRA, sebuah organisasi yang meng-advokasi referendum kemerdekaan selama masa konflik. Pada tanggal 3 September, Nasruddin mempertanyakan kebijakan Muslim Hasballah yang mengangkat delapan orang sebagai tim asistensi pemkab yang merupakan program bantuan teknis dari BRR. Di samping masalah ketidakjelasan status hukum dan tingginya gaji anggota tim tersebut (21 juta rupiah per bulan), Nasruddin juga mengemukakan kurangnya kapasitas dan pengalaman mereka, serta menyuarakan keprihatinan atas pengaruh yang berlebihan dari tim tersebut sejak berada di lingkungan pemkab.

Balas jasa hutang politik juga merupakan faktor terselubung dalam kesulitan yang dialami oleh Akmal Ibrahim, Bupati Aceh Barat Daya (Abdya).³ Pada tanggal 11 dan 12 September, dua kali demonstrasi berturut-turut menuntut Akmal untuk diturunkan dari jabatannya. Hal ini terkait dengan konflik yang sedang terjadi antara Akmal dan Gubernur Irwandi Yusuf mengenai ijin pemberian tanah yang ditandatangani oleh Irwandi untuk PT BAL. Akmal menentang perjanjian itu, karena dia telah berjanji untuk memberikan tanah tersebut kepada masyarakat (lihat Laporan Pemantauan Agustus). Para pendemo menyatakan bahwa Akmal, anggota tim suksesnya, dan para pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), telah menguasai ratusan hektar tanah tersebut. Menurut demonstran, inilah alasan sebenarnya mengapa Bupati menentang ijin tersebut. Akmal berdali bahwa protes tersebut didalangi oleh elit-elit lokal yang selama ini mendekatinya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, dan mengancam akan membuat onar bila ditolak. Akmal adalah figur

² Menurut ICG, faksi GAM yang menentang penunjukkan Nasrullah adalah KPA Bireuen bagian Barat, yang merasa tidak cukup terwakili dalam pemerintahan lokal yang baru dan ingin mengembalikan keseimbangan dengan mengamankan posisi Sekda. Kecamatan Pandrah, lokasi penyerangan konvoi Busmadar, berada di Bireuen Barat Lihat International Crisis Group (2007), Asia Report No. 139, *Aceh: Post-Conflict Complications*.

³ Akmal Ibrahim merupakan seorang mantan wartawan, yang menang dalam pilkada di bawah bendera PAN (Partai Amanat Nasional). Dia tidak berafiliasi dengan GAM.

kontroversial yang belakangan memiliki banyak musuh, termasuk mantan pendukung dan anggota tim suksesnya yang kecewa karena Akmal tidak menepati janji-janji yang dibuatnya pada masa kampanye.⁴ Yang menarik, jajaran GAM/KPA juga terpecah menjadi dua kubu yang pro dan kontra Akmal. Hal itu terlihat dari demonstrasi bulan ini, yang digerakkan baru oleh seorang mantan komandan GAM (lihat Kotak 2).

Kotak 2: Kelompok pro dan kontra Akmal dalam tubuh KPA Blangpidie

Perpecahan di tubuh KPA Blangpidie telah terjadi sejak lama. Awalnya dipicu oleh perdebatan mengenai dana reintegrasi dan semakin memburuk selama masa pilkada (lihat Laporan Pemantauan bulan Maret). Abdurahman, Kepala KPA Blangpidie, sebelumnya mendukung salah satu saingan Akmal, sedangkan Burhan mendukung Akmal. Sekarang, pertentangan antara keduanya sudah berkurang. Akmal disinyalir mengalokasikan proyek senilai 12 milyar rupiah kepada perusahaan yang dikontrol oleh KPA, dan Abdurahman berpihak kepada Akmal dalam sengketa PT BAL. Meski demikian, sebuah demonstrasi mengenai sengketa tersebut pada bulan Agustus menunjukkan perpecahan yang terus terjadi di dalam tubuh KPA (lihat Laporan Pemantauan Agustus). Kubu yang sekarang ini menentang Akmal dipimpin oleh Nasir Alu, seorang mantan komandan militer GAM dan pengusaha gelap. Nasir Alu memainkan peran utama dalam mengerakkan demonstrasi anti-Akmal pada bulan September. Nasir Alu secara terbuka mengaku bahwa motivasi utamanya karena kecewa terhadap Akmal yang tidak menepati janji-janjinya pada masa kampanye. Menurut Nasir, demi mendapatkan dukungan politik, Akmal berjanji kepadanya untuk memberikan kursi di DPRK dan mendukung pembentukan partai lokal. Menurut beberapa sumber, Akmal sengaja memanfaatkan perpecahan-perpecahan di dalam tubuh GAM untuk mengurangi pengaruh mereka.

Kasus-kasus ini menggambarkan tingginya tekanan yang dihadapi para kepala pemerintahan baru baik dari para pendukung maupun dari saingan-saingan kuatnya. Kegagalan dalam memenuhi ekspektasi dan janji-janji yang dibuat selama masa pilkada dapat menghasilkan ketegangan-ketegangan yang ber potensi kekerasan. Tekanan khususnya lebih tinggi di kabupaten-kabupaten yang dimenangkan oleh GAM/KPA, karena para mantan kombatan merasa berhak memperoleh keuntungan dari kemenangan politik tersebut, yang sudah mereka nantikan selama bertahun-tahun berada dalam perjuangan bersenjata. Serangan granat di Aceh Utara dan Lhokseumawe awal tahun ini (lihat Laporan Pemantauan April) kemungkin juga terkait dengan usaha-usaha mantan kombatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap adanya “pemerintah bayangan”, dalam arti dari belakang layar GAM/KPA mempengaruhi anggota-anggotanya yang sekarang sudah meraih posisi-posisi dalam pemerintahan.

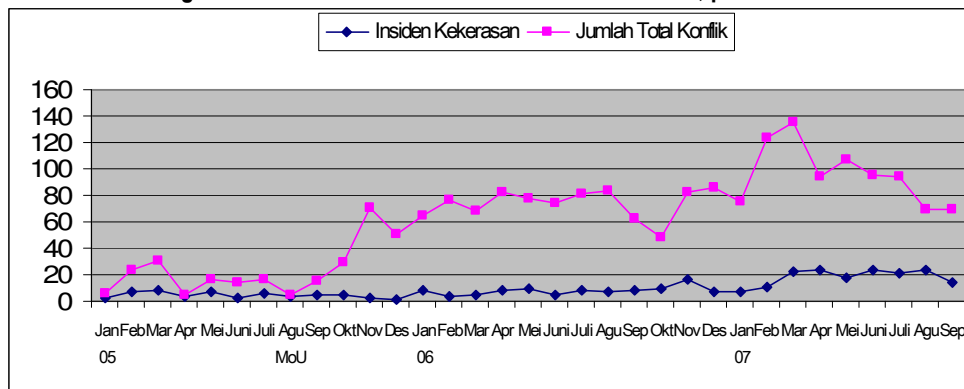
Tekanan tersebut merupakan tantangan serius dalam membentuk tata-pemerintahan yang baik dan perlu ditangani. Khususnya, partai-partai yang berafiliasi dengan GAM/KPA akan kesulitan pada masa pemilu berikutnya jika kepala-kepala pemerintahan yang berasal dari GAM/KPA tidak dapat membuktikan kapasitas mereka dalam memimpin secara efisien dan transparan. Ini pasti merupakan sebuah tantangan bagi GAM/KPA, karena persaingan kekuatan politik justru menjadikan perpecahan internal yang sudah ada semakin menajam. Baik di dalam tubuh KPA maupun organisasi politik lainnya, kelompok yang awalnya bersatu pada masa konflik karena persamaan ideologi, kini makin terpecah ke dalam sejumlah faksi dan aliansi baru yang lebih berdasarkan faktor kepentingan pribadi. Perkembangan ini perlu pemantauan lebih lanjut, karena hal ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap konfigurasi peta politik Aceh menjelang pemilu 2009, serta terhadap peluang untuk kedamaian yang langgeng.

⁴ Beberapa orang mantan pendukung Akmal yang telah menjadi musuhnya adalah Rafli Aris, seorang kontraktor yang telah menyumbang 4 miliar rupiah untuk kampanye Akmal, dan Datok Razali, seorang pengusaha pertanian yang mengklaim kepemilikan tanah yang sekarang menjadi sengketa antara PT BAL dan Akmal.

Kekerasan menurun seiring masuknya bulan puasa

Bulan ini tingkat konflik tetap sama dengan bukan lalu dan relatif rendah dengan total 70 konflik yang dilaporkan (lihat Figur 1). Jumlah insiden kekerasan hanya 14 kasus. Ini merupakan penurunan signifikan dibanding dengan tingkatan tinggi yang tercatat sejak Maret tahun ini. Hal ini sangat mungkin karena datangnya bulan puasa Ramadhan.⁵ Terpenting, lebih dari sepertiga insiden kekerasan melibatkan anggota GAM/KPA, satuan keamanan atau keduanya (lihat Tabel 1).

Figur 1: Insiden Kekerasan vs. Jumlah Total Konflik, per bulan



Tabel 1: Insiden kekerasan melibatkan GAM/KPA dan satuan keamanan di bulan September

	Insiden kekerasan
I. Anggota GAM/KPA vs aparat keamanan ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • 25 September, Banda Aceh. Masyarakat, termasuk anggota KPA, menyerang dan merusak markas polisi Banda Aceh untuk menuntut pembebasan mantan kombatan GAM yang ditangkap karena diduga melakukan pembalakan liar.
II. Intra-GAM	<ul style="list-style-type: none"> • 24 September, Aceh Selatan. Anggota-anggota KPA menganiaya ketua asosiasi pemuda lokal (sepertinya pertikaian internal KPA yang bersumber pada perebutan proyek desa). • 27 September, Bireuen. Pelemparan batu ke arah konvoi Wakil Bupati dan rombongannya. • 28 September, Pidie. Seorang anggota KPA dibunuh oleh anggota KPA lain. Motif masih belum jelas.
III. Masyarakat vs aparat keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • 8 September, Banda Aceh. Sekelompok mahasiswa Akademi Kelautan dianiaya oleh 15 petugas polisi.

Insiden-insiden di atas ini mengindikasikan adanya perubahan penyebab konflik. Perpecahan dalam tubuh GAM/KPA, dan keterlibatan sejumlah mantan kombatan dalam kegiatan-kegiatan ilegal, bukan fenomena baru. Meskipun demikian, persaingan kepentingan pribadi ternyata telah menggantikan perbedaan ideologi sebagai faktor dominan dalam ketegangan-ketegangan tersebut.

Insiden kekerasan lainnya yang menonjol termasuk demonstrasi FPD (Front Pembela Demokrasi) di Aceh Tenggara, menentang pelantikan bupati terpilih pada 1 September. Demonstrasi berubah menjadi keributan, tercatat 20 orang terluka (termasuk enam petugas polisi). Beberapa jam sebelum upacara pelantikan, terjadi pembakaran kantor Bappeda Aceh Tenggara dan sebuah gereja. Sangat diragukan bahwa insiden-insiden ini menandai berakhirnya konflik politik yang telah berlangsung selama deulapan bulan terakhir antara para pendukung Bupati sebelumnya dan Bupati sekarang (lihat Laporan Pemantauan Agustus). Pertentangan diperkirakan berlanjut setelah berakhirnya bulan puasa, melalui kekerasan atau

⁵ Sebagai contoh, demonstran anti-Akmal di Aceh Barat Daya (lihat atas) menyatakan bahwa mereka sengaja mengadakan demonstrasi skala rendah untuk menghindari merusak suasana Ramadhan, namun mengumumkan bahwa demo lebih besar akan diatur setelah liburan Hari Raya.

⁶ Catat bahwa meski insiden ini melibatkan mantan kombatan, tidak dapat digolongkan sebagai kontak senjata antara TNA dan aparat keamanan.

cara-cara lain. Terakhir, minggu-minggu pertama Ramadhan juga mencatat aksi main hakim sendiri terkait kasus khalwat: tiga pasangan belum menikah yang tertangkap sedang berasyik masuk dianiaya oleh anggota masyarakat di Aceh Barat, Lhokseumawe, dan Banda Aceh.

Kriminalitas: KPA tertekan oleh upaya pemerintah memberantas senjata ilegal

Besarnya kekhawatiran atas meningkatnya angka kriminalitas berujung pada perkembangan baru bulan ini.⁷ Pada tanggal 4 September, muspida provinsi mengeluarkan maklumat bahwa bagi masyarakat yang masih menyimpan senjata ilegal diberi waktu satu bulan untuk menyerahkan senjata tersebut tanpa dikenakan sanksi. Setelah satu bulan, terhitung mulai 9 September s/d 9 Oktober, polisi dan TNI akan melakukan operasi sweeping terpadu secara intensif. Polisi menyatakan bahwa senjata ilegal yang masih beredar telah “teridentifikasi”, namun menolak untuk mengumumkan jumlah totalnya. Pada akhir bulan September, baru tiga yang diserahkan, dan semuanya dalam kondisi rusak.

Pada hari yang sama dengan pengeluan maklumat tersebut, kepala TU SMA1 kota Sakti di Pidie terbunuh dalam aksi perampokan bersenjata. Tuuduhan pelaku kejahatan tersebut langsung diarahkan ke Si Teh, seorang mantan kombatan GAM. Si Teh terkenal sebagai pemimpin kelompok kriminal yang terlibat dalam serangkaian aksi kejahatan selama 2006 dan 2007. Setelah dikejar selama tiga hari, Si Teh akhirnya terbunuh dalam penggerebekan polisi. Kotak 3 merangkum semua kasus kriminal bersenjata yang terjadi pada bulan September. Perlu dicatat bahwa dari semua tindakan kejahatan tersebut, hanya satu kasus yang tidak terjadi di pesisir timur. Di samping kasus Si Teh, tidak ada aksi yang mengakibatkan kematian atau luka, dan tidak ada yang dapat dituduhkan secara pasti kepada mantan GAM/KPA.

Namun, kematian Si Teh, bersama dengan penangkapan mantan kombatan lainnya yang juga terlibat dalam aksi kriminal selama beberapa bulan terakhir ini⁸, memberi kekuatan kepada keluhan pihak militer bahwa GAM tidak menyerahkan semua senjatanya pada masa *decommissioning* (pemusnahan) paska-MoU. Walaupun GAM menepati kewajiban MoU dengan menyerahkan 840 senjata, KPA tetap didesak untuk membantu mengumpulkan senjata-senjata yang masih beredar. Ibrahim KBS, juru bicara KPA, menyampaikan dukungan dan komitmen KPA untuk bekerjasama dengan pemerintah, namun disertai dengan kekhawatiran jika anggotanya dijadikan sebagai kambing hitam. Dia juga mempertanyakan ketidakjelasan prosedur yang menjamin tidak adanya sanksi hukum bagi orang-orang yang bersedia menyerahkan senjata, dan menyarankan bahwa upaya memberantas kekerasan

Kotak 3: Kriminalitas bersenjata di bulan September

- 4 September, Sigli. Ketua TU SMA1 kota Sakti tewas ditembak oleh dua orang perampok bersenjata api laras pendek. Uang gaji guru sebanyak 87 juta rupiah dibawa lari oleh pelaku.
- 11 September, Kec. Simpang Ulim, Aceh Timur. Lima orang perampok bersenjata M-16 merampok sebuah truk pengangkut bahan makanan Ramadhan senilai 10 juta rupiah. Empat anggota kelompok perampok tersebut ditangkap polisi pada tanggal 29 September.
- 17 September, Kec. Idi Rayeuk, Aceh Timur. Tiga orang perampok bersenjata AK-47 dan sangkur merampok sebuah keluarga. Gelang emas senilai 14 juta rupiah dan sebuah sepeda motor milik korban disikat kawanannya tersebut.
- 29 September, Meulaboh, Aceh Barat. Pengusaha kelontong diculik oleh empat orang bersenjata api laras pendek. Dia kemudian dibebaskan di Pidie pada tanggal 2 Oktober, setelah uang tunai sebanyak 22 juta rupiah dan sebuah HP diambil oleh pelaku.
- 30 September, Kec. Bandar Baru, Pidie Jaya. Dua orang bersenjata api laras panjang mirip AK-47 merampok 2 juta rupiah milik seorang warga.

⁷ Menurut data polisi, kriminalitas total telah mencapai kenaikan 40% sejak penanda tanganan MoU bulan Agustus 2005 (kalkulasi berdasarkan jumlah kasus).

⁸ Badruddin, seorang mantan komandan GAM, dan Yusuf alias Raket, seorang anggota KPA, ditangkap di Aceh Utara masing-masing pada bulan Juni dan Agustus tahun ini. Badruddin adalah tersangka utama dalam aksi perampokan bersenjata di Aceh Utara dan Bireuen, termasuk perampasan mobil Cardi International pada bulan Mei. Raket dituduh terlibat perampokan sebuah gudang Oxfam. Sementara KPA mengakui Raket sebagai anggota, mereka juga menggaris bawahi kurangnya bukti-bukti tentang keterlibatannya.

seharusnya juga ditujukan kepada kasus penyalahgunaan kekuatan oleh aparat keamanan. Sebagai contoh, salah seorang kelompok Si Teh menghubungi Serambi dan menyatakan bahwa Si Teh dieksekusi oleh polisi (dia juga membantah Si Teh terlibat dalam perampokan dan pembunuhan yang terjadi pada tanggal 4 September).⁹

Meningkatnya angka kriminalitas, serta keterlibatan mantan kombatan dalam aksi-aksi kriminal, mengingatkan kita akan tingkat pengganguran yang kronis di Aceh, dan kelemahan pelaksanaan program reintegrasi sampai saat ini. Dana kompensasi bagi anggota GAM yang kembali jarang sekali menghasilkan kegiatan-kegiatan yang produktif. Bagaimanapun juga, ada beberapa faktor lainnya. Sejumlah mantan kombatan – khususnya yang bergabung pada tahun-tahun terakhir konflik – memiliki latar belakang kriminal, dan sebagian kombatan lainnya sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal sebelum MoU. Pengurangan angka kriminalitas merupakan sebuah usaha yang sulit dan kompleks yang tentunya membutuhkan upaya-upaya jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan sosial dan memperbaiki penegakan hukum. Untuk sementara, maklumat untuk mengumpulkan senjata ilegal merupakan sebuah kesempatan bagi KPA untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga perdamaian yang abadi, dan bagi aparat keamanan hal ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan masyarakat.

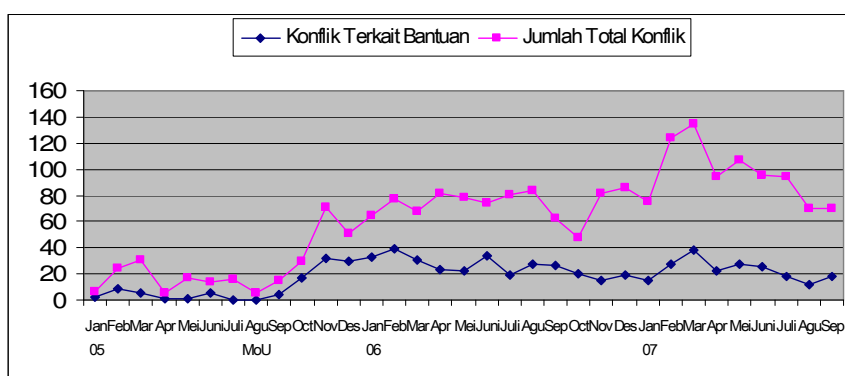
Konflik terkait bantuan

Pada bulan September, dilaporkan 18 konflik terkait bantuan. Jumlah ini setara dengan 26% dari total konflik baru (lihat Figur 1).

Sama dengan bulan-bulan sebelumnya, hampir separuh dari konflik terkait bantuan berhubungan dengan proyek-proyek BRR. Di samping protes-protes terhadap keterlambatan pelaksanaan,

rendahnya kualitas implementasi proyek dan pemborosan dana operasional, BRR juga mendapat kritik tajam mengenai persoalan agama yang cukup sensitif. Dalam sebuah artikel artikel yang diterbitkan The Jakarta Post pada tanggal 21 September, Kuntoro Mangkusubroto, Ketua Bapel BRR, mengatakan bahwa “syariah Islam menghambat pembangunan di Aceh”.¹⁰ Pada tanggal 26 September, 30 anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) melakukan demonstrasi di depan kantor DPRA, dan menuntut Kuntoro memberikan penjelasan. Wakil Ketua DPRA berjanji akan menindak lanjuti tuntutan KAMMI. Konflik ini menunjukkan bahwa syariah Islam tetap merupakan isu yang sangat sensitif di Aceh. Ini juga menegaskan bahwa badan-badan pemerintah, donor-donor dan LSM perlu memperhatikan konteks budaya lokal dalam melaksanakan program-programnya. Bagaimanapun pengaruh syariah Islam terhadap pembangunan Aceh, hal ini terlalu sensitif dan beresiko bagi kekuatan politik apapun untuk mempermasalahkannya menjelang pemilu 2009.¹¹

Figur 2: Konflik terkait bantuan, per bulan



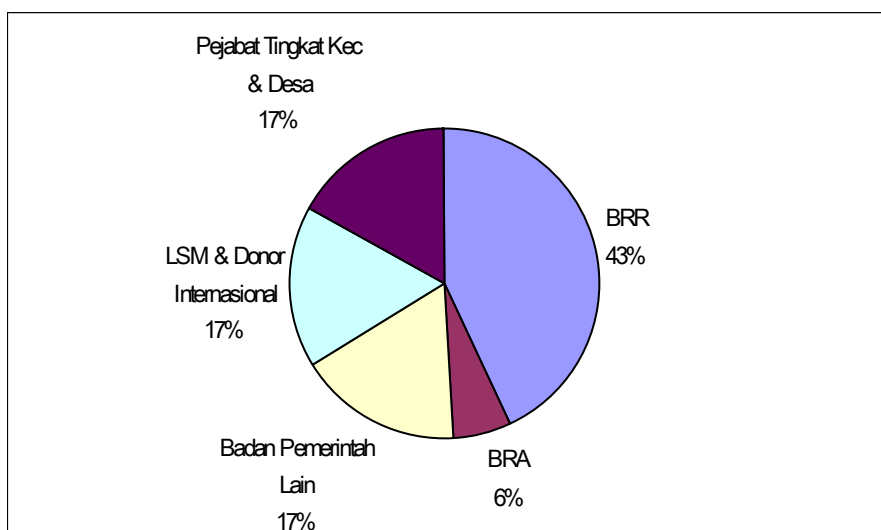
⁹ KPA tidak memberikan komentar atas kematian Si Teh, tetapi memprotes penangkapan Rokat, yang ditembak pada bagian kaki.

¹⁰ Kamaruzzaman, Sekretaris Bapel BRR dan mantan pejabat senior GAM, menambahkan bahwa syariah Islam diimplementasikan selama masa DOM pada tahun 1990-an tanpa persetujuan seluruh komponen masyarakat Aceh.

¹¹ Ironisnya, hal ini terjadi ketika BRR sedang berusaha “mengembalikan kepercayaan publik” dengan menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi. Pada tanggal 9 September, BRR mengumumkan bahwa 43 kasus korupsi, yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR ke

Organisasi-organisasi lain, termasuk donor dan LSM internasional, juga menghadapi beberapa keluhan dan kesulitan dalam pelaksanaan program mereka. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa lebih dari 80% konflik terkait bantuan di bulan September ditujukan kepada lembaga-lembaga pemerintah (BRR, BRA, Dinas-Dinas terkait dan pemerintah lokal), atau kepada pejabat-pejabat tingkat kecamatan dan desa (lihat Figur 3). Figur bulan September konsisten dengan data yang tercatat selama enam bulan belakangan, dimana 62% konflik terkait bantuan mulai bulan April sampai dengan September ditujukan kepada pelaksanaan program-program pemerintah, dan 14% merupakan tuduhan kepada pejabat-pejabat lokal yang tidak transparan. Aceh sekarang berada pada masa transisi, dimana LSM-LSM dan donor-donor internasional secara bertahap mengalihkan tanggung jawab kepada pemerintah lokal dalam pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, sehingga peningkatan kapasitas, transparansi dan pertanggungjawaban lembaga-lembaga pemerintah beserta pejabat-pejabat di semua tingkatan merupakan kebutuhan yang mendesak.

Figur 3: Sasaran konflik terkait bantuan di bulan September



Komisi Pemberantasan Korupsi, sekarang sudah ditangani ke pihak kepolisian dan kejaksaan tinggi Aceh. Kerugian akibat 43 kasus tersebut – kebanyakan terkait proyek drainase dan irigasi serta pengadaan perlengkapan nelayan – mencapai angka 18,8 milyar rupiah. Perlu diingat bahwa 43 kasus tersebut hanya sebagian kecil dari 153 kasus yang diselidiki oleh pihak SAK, dan tidak ada satu pun yang berhubungan dengan proyek perumahan BRR yang selama ini mendapat banyak kritikan. Kasus-kasus yang dilaporkan BRR ini kemungkinan besar bisa dikatakan hanya puncak gunung es.